

DESKRIPSI SERTIFIKASI KOMPETENSI TUKANG LOKAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Gusni Vitri¹⁾ Deni Irda Mazni²⁾

¹⁾ Teknik Sipil Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103 A Simpang Haru Kota Padang Indonesia
email : vitri.gusni@gmail.com

²⁾ Teknik Sipil Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103 A Simpang Haru Kota Padang Indonesia
email : deniirdamazni@gmail.com

ABSTRACT

The construction regulation desires that every user and service provider is required to hire a construction worker who has a work competency certificate. As one skilled manpower, construction crafts give a significant contribution to the quality of construction works. The Construction Services Development Agency (LPJK) of West Sumatera Province as an organization for the construction service community has an important role in the certification registration of construction crafts. This is a descriptive quantitative research, with primary and secondary data collection from related stakeholders. Analyzes were performed for the data of the number of certification participants in the construction building workers category with architectural classification (TA code), civil classification (code TS) and environment (Code TT) in West Sumatera Province from 2014 until October 2017. The results showed that the number of registered construction crafts during the period as many as 3286 people and only 16.71% of that number who have identity cards domicile in the province of West Sumatra. As many as 83.29% registered construction crafts are from various regions in Indonesia (outside West Sumatra Province). Registration to obtain certificate of competence is mostly done in year 2015.

Keywords: *Certification Description, Artisan Competence, Certification of construction crafts, Local construction crafts, LPJK West Sumatra*

1. Pendahuluan

Industri jasa konstruksi mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 30% selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan itu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pelaku industri konstruksi meningkat. Sektor konstruksi menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen. Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen. Angka ini menjadikannya di urutan ke-4 setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan (harian pikiran rakyat, 2017).

Pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang pertumbuhan ekonomi negara kita. Infrastruktur juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Oleh sebab itu infrastruktur merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan. Industri konstruksi menurut UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, diamanatkan jika setiap pengguna dan penyedia jasa diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Permen juga akan menjamin mengenai upah para pekerja sertifikasi. Di mana untuk para pekerja yang bersertifikasi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang belum memiliki sertifikat.

Gerakan sertifikasi merupakan bagian dari target sertifikasi tenaga konstruksi secara nasional hingga 2019 sebanyak 750.000 tenaga konstruksi ahli dan terampil. Sertifikasi tidak lain adalah untuk meningkatkan daya saing para tenaga konstruksi itu sendiri, termasuk menyiapkan tenaga konstruksi nasional bersaing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku sejak 2015. Kepala Pusat Kompetensi dan pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan jumlah tenaga konstruksi terampil Indonesia sekitar dua juta, namun baru 500 ribuan yang bersertifikasi. Pelatihan kompetensi yang di lakukan dalam rangka memberikan sertifikasi keterampilan bagi mereka sehingga memiliki peluang bersaing dengan tenaga konstruksi dari negara lain.

2. Tinjauan Pustaka

Tenaga kerja konstruksi yang paling bawah yang biasa disebut dengan tukang (*construction craft*) merupakan tenaga kerja yang paling terdepan yang terlibat dan berhadapan langsung dengan pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Sebagai tenaga kerja yang paling terdepan tentu saja tukang sebaiknya memiliki spesialisasi dan kompetensi pada bidang tertentu dan bersertifikat. Dari 4,9 juta tenaga konstruksi di Indonesia, baru sekitar 3 persen yang telah memiliki sertifikat dan berkompeten, padahal, sertifikat tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi tenaga kerja konstruksi dibidangnya masing-masing (Haryadi, 2010) .

Menurut U.S. Departement of Labour yang dikutip oleh Imam Satyarno (2004), tenaga kerja konstruksi (*construction crafts*) yang biasa disebut dengan tukang dapat dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tukang batu (*brickmasons/ blockmasons/ stone masons*) adalah tenaga kerja konstruksi yang mempunyai pekerjaan mulai dari yang sederhana yaitu membuat tembok sampai mengerjakan ornamen luar bangunan.

- b. Tukang kayu (*carpenters*) adalah tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan memotong, menyambung dan merangkai kayu dan material lain untuk konstruksi bangunan, jalan, jembatan, struktur dan lain sebagainya.
- c. Tukang beton (*cement masons* atau *concrete finisher*), adalah tenaga kerja yang mengerjakan beton mulai dari penyiapan bekisting, pengecoran, perawatan sampai finishing.
- d. Operator peralatan konstruksi (*construction equipment operators*) adalah tenaga kerja yang mengoperasikan peralatan atau mesin yang digunakan dalam konstruksi, termasuk pemeriksaan dan perbaikan yang diperlukan.
- e. Tukang baja (*reinforcing iron* dan *metal worker*) adalah tenaga kerja yang merangkai baja tulangan beton dan baja konstruksi.
- f. Laden (*construction laborer*), adalah tenaga kerja yang membantu para tukang.

Menurut undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017, Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi. Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:

- a. operator;
- b. teknisi atau analis; dan
- c. ahli.

Dalam penelitian Ervianto (2008) dalam pengukuran produktivitas pekerja bangunan, salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja konstruksi adalah adanya standarisasi. Selain itu tingkat upah pekerja, insentif dan hubungan pekerja juga mempengaruhi hal ini. Salah satu tujuan sertifikasi adalah peningkatan upah untuk tenaga yang sudah mempunyai kompetensi.

Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang di atur UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 Pasal 70, memuat hal-hal berikut :

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi berlaku untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Penelitian Yoel Warman (2008) menemukan bahwa dampak yang diharapkan dari kebijakan mengenai kewajiban sertifikasi tenaga ahli konstruksi di Indonesia telah dirasakan oleh individu tenaga ahli konstruksi, sedangkan dampak yang diharapkan secara global belum tercapai karena pengadaan sertifikat keahlian (SKA) menjadi lain tujuannya yaitu hanya sekedar untuk memenuhi syarat tender sehingga terjadi "jual beli" SKA yang mengakibatkan kompetensi tidak terjamin. Dengan adanya fenomena "jual beli" SKA, maka perlu dibuat kebijakan yaitu untuk membatasi tenaga kerja yang wajib memiliki Sertifikat Keahlian. Kebijakan ini dapat mengacu kepada sistem sertifikasi di negara lain yang memiliki sistem sertifikasi tenaga ahli yang hampir sama dengan yang sedang berjalan di Indonesia, sehingga tidak perlu terjadi perubahan yang sangat signifikan.

Penelitian Wardhana dan Sutikno (2015), menemukan bahwa dari seluruh tukang besi beton yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi di wilayah Surabaya, rata-rata keterampilan tukang besi beton secara keseluruhan masuk dalam kategori baik dengan prosentase sebesar 76,57%. Alur proses permohonan registrasi dan sertifikat tenaga kerja ahli dan tenaga kerja terampil seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur pelaksanaan sertifikasi kompetensi

3. Metode Penelitian

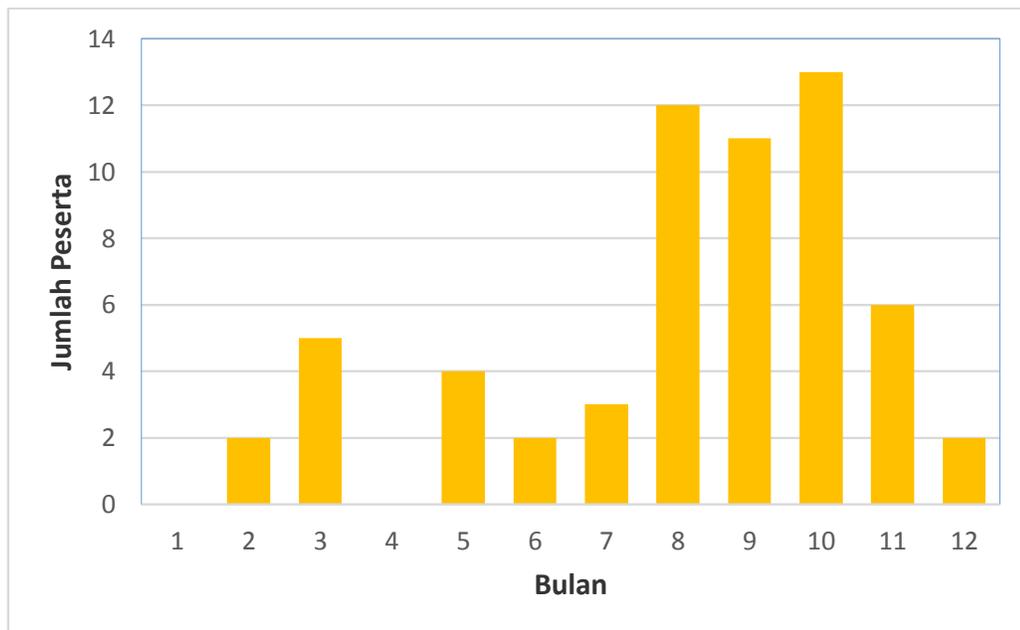
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode Deskriptif yang menjelaskan fenomena yang ada dengan angka dan pengolahan statistik. Penelitian ini menggambarkan karakteristik sesuatu sebagai mana adanya. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. Pengumpulan data dilakukan di LPJK Sumatera Barat dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Data yang ada di olah, di analisis dan di klarifikasi kembali ke stakeholder di atas untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan kode kompetensi untuk sertifikasi tenaga terampil, kajian pada penelitian ini di batasi untuk kategori tukang bangunan dengan kode sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kode Kompetensi Tukang Bangunan

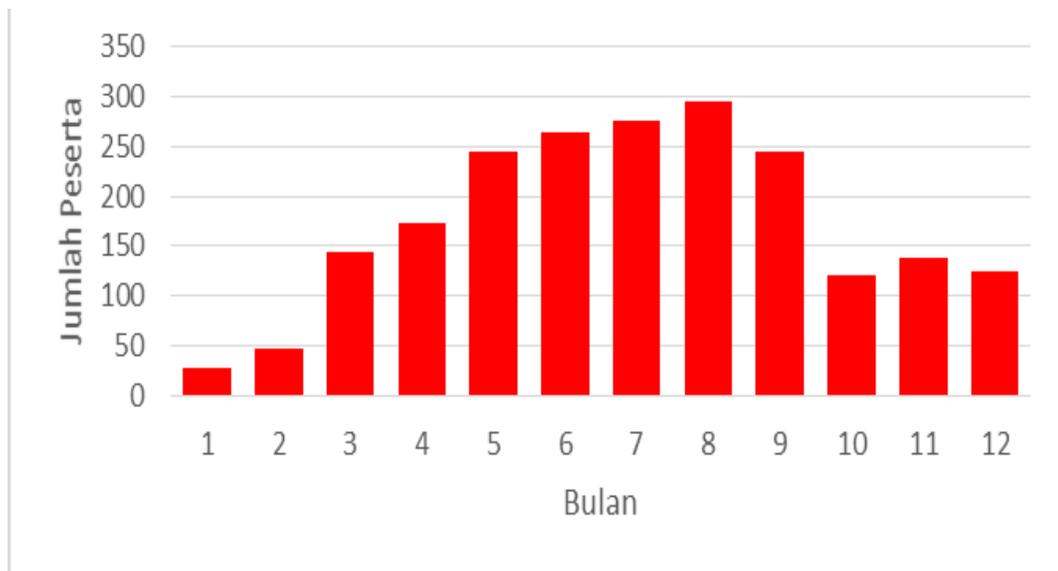
Bidang	Kode Bidang	Keahlian
Arsitektur	TA 004	Tukang Pasang Bata
Arsitektur	TA 005	Tukang Pasang Batu
Arsitektur	TA 006	Tukang Plesteran
Arsitektur	TA 007	Tukang Pasang Keramik
Arsitektur	TA 008	Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin / Marmer
Arsitektur	TA 009	Tukang Kayu
Arsitektur	TA 011	Tukang Pasang Plafon
Arsitektur	TA 012	Tukang Pasang Dinding Gypsum
Arsitektur	TA 013	Tukang Plafon Gypsum
Arsitektur	TA 014	Tukang Cat Bangunan
Arsitektur	TA 015	Tukang Taman / Lanscape
Arsitektur	TA 018	Tukang Pelitur Kayu
Arsitektur	TA 019	Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat
Sipil	TS 010	Tukang Pekerjaan Pondasi
Sipil	TS 011	Tukang Pekerjaan Tanah
Sipil	TS 012	Tukang Besi-beton
Sipil	TS 013	Tukang Cor Beton
Sipil	TS 014	Tukang Pasang Perancah
Sipil	TS 015	Tukang Pasang Scaffolding
Sipil	TS 020	Tukang Pekerjaan Baja
Sipil	TS 026	Tukang Perancah Besi
Sipil	TS 027	Tukang Konstruksi Baja dan Plat
Sipil	TS 053	Tukang Kayu Bekisting
Sipil	TS 054	Tukang Pasang Beton Pra Cetak
Tata Lingkungan	TT 007	Tukang Pipa Bangunan
Tata Lingkungan	TT 016	Tukang Plumbing

4. Hasil dan Pembahasan

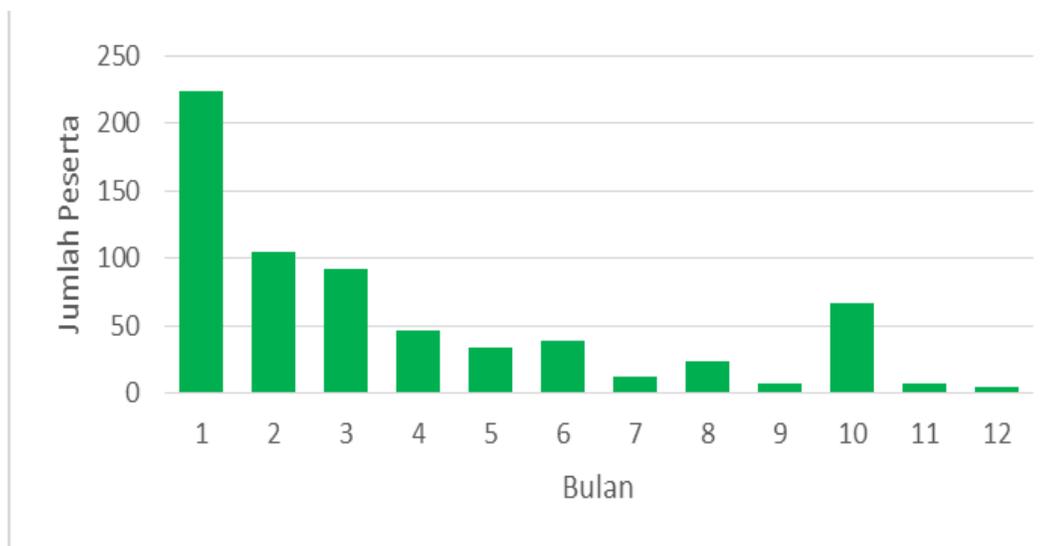
Sertifikasi Kompetensi untuk tenaga terampil terbagi atas beberapa bidang, yaitu: Arsitektur, Sipil, Tata Lingkungan, Mekanikal, Elektrikal dan Bidang lain-lain dengan bidang keahlian tukang, mandor, teknisi, operator, mekanik. Untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan, bidang keahlian adalah gabungan dari beberapa bidang kompetensi di atas. Data yang di temukan di jumlah sertifikasi tukang yang ada di Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi (LPJK) adalah data secara umum yang harus di pisah berdasarkan kode kompetensi dan gabungan dari sejak awal penerbitan awal sampai dengan saat ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak awal penerbitan sertifikat kompetensi tukang di LPJK Provinsi Sumatera Barat (tahun 2014) sampai dengan bulan Oktober 2017. Jumlah sertifikat kompetensi tenaga terampil yang sudah dikeluarkan oleh LPJK Prov. Sumbar dengan kode di atas adalah sebanyak 3286 sertifikat. Dari hasil pengolahan data, digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. Data peserta sertifikasi tukang tahun 2014



Gambar 3. Data peserta sertifikasi tukang tahun 2015



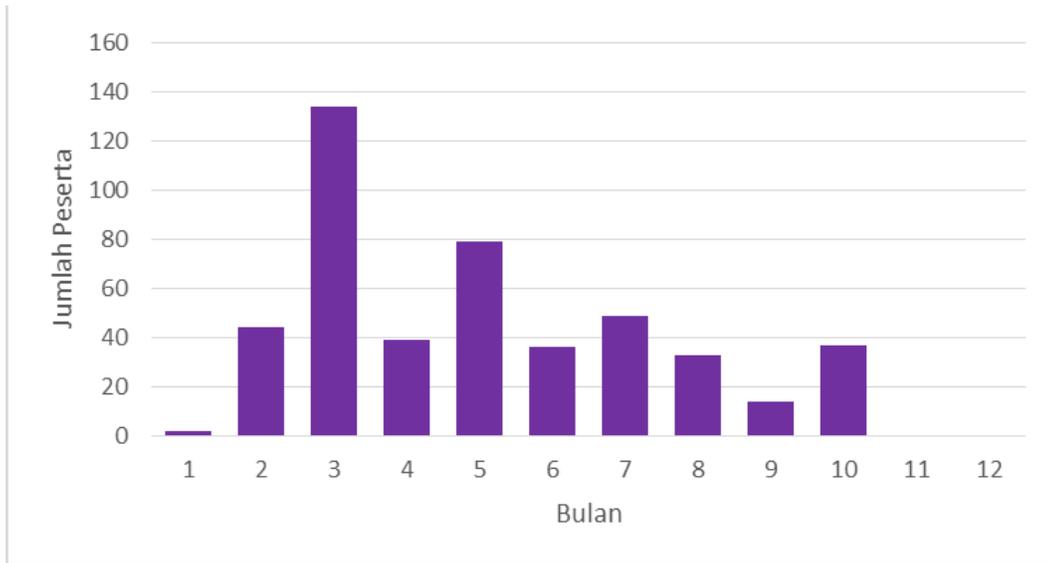
Gambar 4. Data peserta sertifikasi tukang tahun 2016

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa:

1. Jumlah sertifikat kompetensi terbanyak di terbitkan pada tahun 2015 dan paling sedikit pada tahun 2014.
2. Pada tahun 2014, tukang yang melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat kompetensi masih sedikit disebabkan aturan untuk melampirkan sertikat kompetensi untuk pelepasan/tender bagi tenaga terampil belum menjadi suatu keharusan.
3. Kecenderungan pendaftar untuk sertifikat kompetensi terbanyak setiap tahunnya pada bulan yang berbeda-beda. Pada tahun 2014, pendaftar terbanyak pada bulan

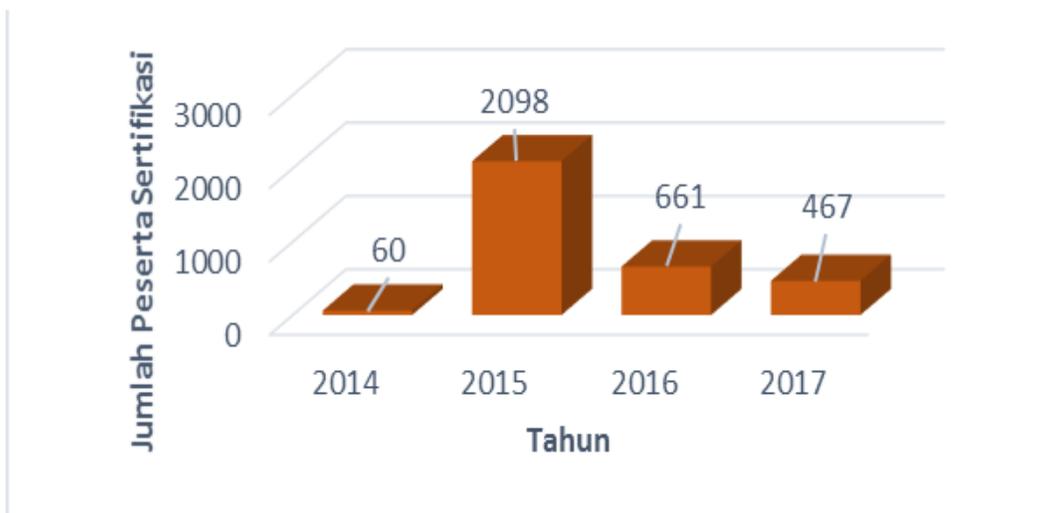
oktober, tahun 2015 pada bulan agustus, sementara pada tahun 2016 dan 2017 cenderung pada awal tahun di bulan januari dan maret.

4. Pada gambar di bawah ini, data bulan november dan desember 2017 masih kosong karena data terakhir penelitian ini adalah bulan oktober 2017.



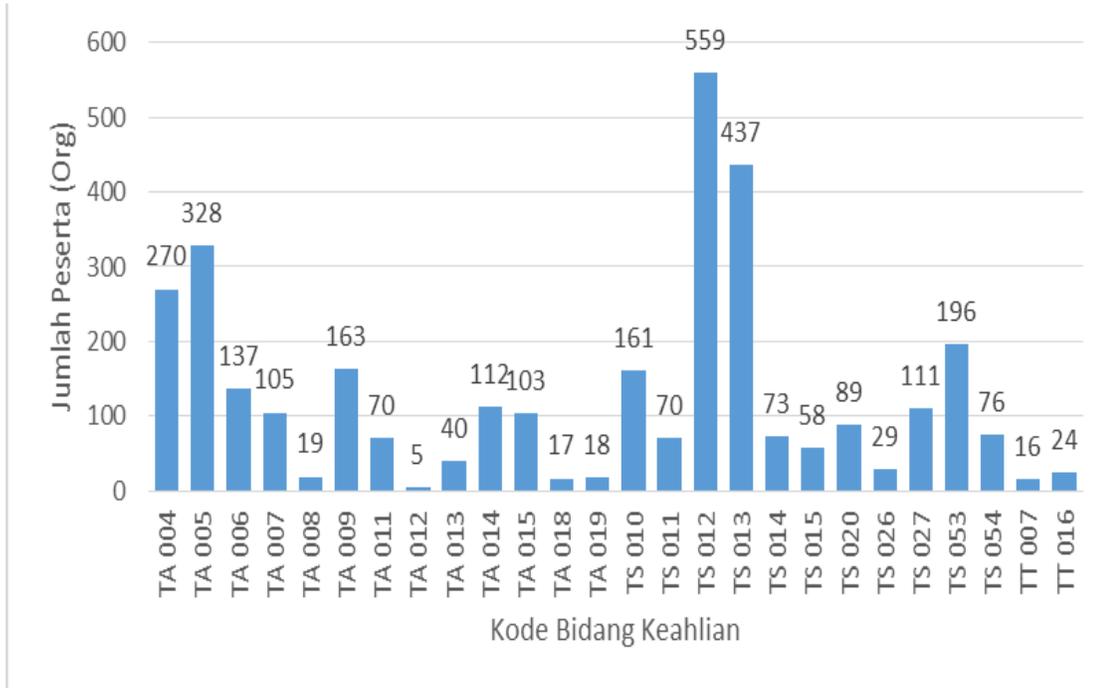
Gambar 5. Data peserta sertifikasi tukang tahun 2017

Pada gambar di bawah ini, jumlah sertifikat kompetensi untuk tukang yang di keluarkan setiap tahunnya fluktuatif dan cenderung terbanyak pada tahun 2015.



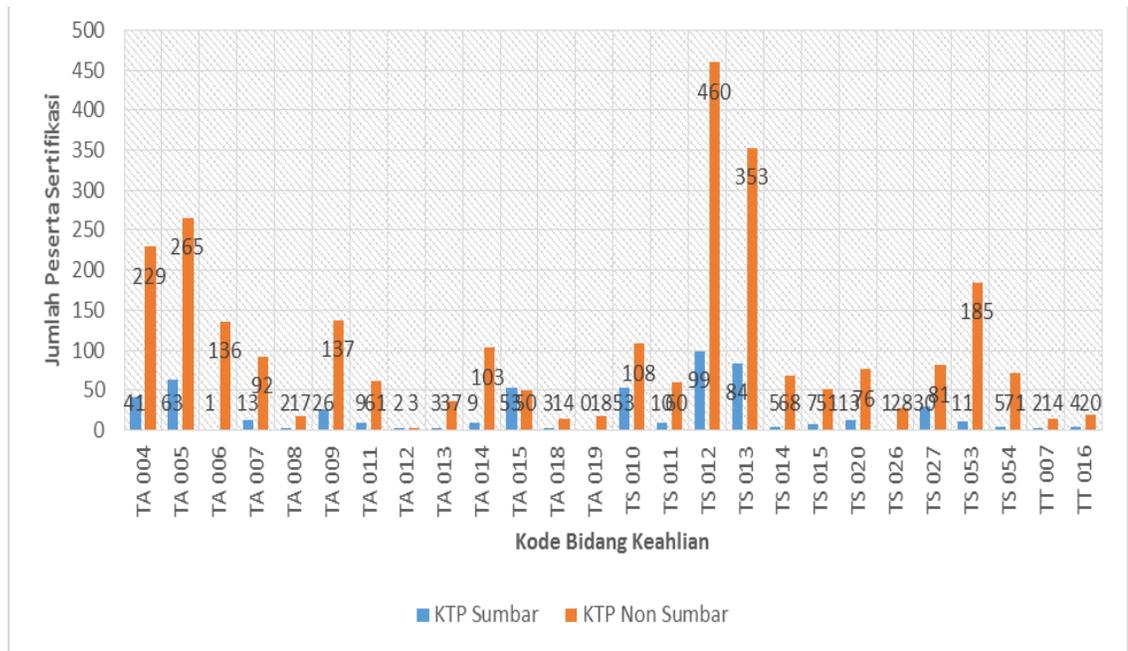
Gambar 6. Rekapitulasi jumlah peserta sertifikasi tukang per_tahun

Berdasarkan bidang kompetensi keahlian tukang, sertifikat kompetensi terbanyak adalah untuk tukang besi beton (kode TS-012) sebanyak 559 orang dan yang paling sedikit adalah untuk tukang pasang dinding gypsum (kode TA-012) sebanyak 5 orang.



Gambar 7. Rekapitulasi jumlah peserta sertifikasi tukang berdasarkan bidang keahlian

Data peserta sertifikasi kompetensi dipisahkan berdasarkan kode pada kartu tanda penduduk (KTP) yang di lampirkan sebagai salah satu syarat registrasi. Seluruh data di pisahkan berdasarkan kode yang sudah di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk kode Provinsi Sumatera Barat akan di awali dengan angka 13 (tiga belas).



Gambar 8. Rekapitulasi jumlah peserta sertifikasi tukang berdasarkan KTP

Gambar di atas memperlihatkan bahwa:

- Peserta sertifikasi kompetensi tukang sebagian besar didominasi oleh tukang yang beralamat domisili di luar provinsi Sumatera Barat dengan persentase 16,71% (Sumbar) dan 83,29%.
- Untuk kompetensi tukang kusen pintu dan jendela bertingkat, tidak ada yang beralamat domisili di Sumatera Barat.
- Jumlah peserta kompetensi yang mempunyai KTP Prov. Sumatera Barat terbanyak pada bidang tukang besi beton (TS-012) dan tukang cor beton (TS-013) sebanyak 99 orang dan 88 orang.

Untuk pendaftaran mendapatkan sertifikat kompetensi, pada umumnya tukang di fasilitasi oleh perusahaan pemberi kerja atau yang menaungi tukang tersebut. Tukang yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat adalah tukang yang bekerja pada perusahaan tertentu yang akan berpindah-pindah sesuai dengan lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih mendalam tentang tantangan kompetensi tukang lokal di industri konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

5. Kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Jumlah Tukang yang terdaftar selama periode tersebut sebanyak 3286 orang. Peserta sertifikat kompetensi terbanyak adalah untuk tukang besi beton (kode TS-012) sebanyak 559 orang dan yang paling sedikit adalah untuk tukang pasang dinding gypsum (kode TA-012) sebanyak 5 orang.
2. Dari keseluruhan sertifikat sertifikasi yang di terbitkan oleh LPJK Provinsi Sumatera Barat, hanya 16,71% dari jumlah tersebut yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili di Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 83,29% Tukang yang terdaftar berasal dari berbagai wilayah di Indonesia (luar Provinsi Sumatera Barat).
3. Pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat kompetensi paling banyak dilakukan pada tahun 2015. Berhubung sertifikat kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun, maka pada tahun 2018 akan terjadi pendaftaran kembali (pembaruan) sertifikat kompetensi tenaga terampil.

6. Saran

Saran untuk penelitian yang akan datang:

1. Menurut Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, seluruh tenaga ahli terampil yang bekerja di bidang konstruksi harus mempunyai sertifikat kompetensi. Oleh sebab itu, peraturan tersebut menjadi kewajiban seluruh *stakeholders* terkait penerapannya di lapangan.
2. Dari hasil data di atas, sebanyak 83,29% Tukang yang terdaftar untuk mendapatkan sertifikat kompetensi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia mempunyai KTP domisili di luar Provinsi Sumatera Barat. Hal ini harus di teliti lebih lanjut, apakah mayoritas tukang/pekerja konstruksi di Provinsi Sumatera Barat memang berasal dari luar daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Ah Haryadi, Bada. 2010. Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Menghadapi Era Liberalisasi. Jurnal Inersia Vol. VI No. 1, Mei 2010 <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/download/10572/8056>
- [2] Industri Jasa Konstruksi Tumbuh 30% dalam 3 Tahun. <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/03/09/industri-jasa-konstruksi-tumbuh-30-dalam-3-tahun-395729> (akses 28 agustus 2017)
- [3] Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015) http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/02/25/1/a/lampiran_i.pdf
- [4] Menakar Tenaga Konstruksi Nasional Via Sertifikasi. Edy Sujatmiko. <http://www.antarane.ws.com/berita/603306/menakar-tenaga-konstruksi-nasional-via-sertifikasi> (akses 28 agustus 2017)

- [5] Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 05 tahun 2011 tentang Tata cara registrasi ulang, perpanjangan masa berlaku dan permohonan baru sertifikat tenaga kerja terampil konstruksi (link download : download.lpj.konstruksi.go.id/sk%20no.113%20th.2004.pdf)
- [6] Sistem sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi http://www.bsn.go.id/uploads/download/Sistem_sertifikasi_TK_Konstr_041020161.pdf
- [7] Tukang Bangunan Hingga Mandor Dapat Sertifikat Bakal Raih Bayaran Lebih Besar. <http://economy.okezone.com/read/2017/08/21/470/1759755/3-255-tukang-bangunan-hingga-mandor-dapat-sertifikat-bakal-raih-bayaran-lebih-besar> (akses 28 agustus 2017)
- [8] Undang-undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. (link download : binakonstruksi.pu.go.id/v5/file_roadshow/UU_no_2_2017.pdf)
- [9] Wardhana FK, Sutikno. Kualifikasi Pengetahuan Dan Keterampilan Tukang Besi Beton (Stell Rods Worker) Berdasarkan Skkni Pada Proyek Di Wilayah Surabaya. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Vol 1 Nomer 1/rekat/15 (2015), 96 -104 ejournal.unesa.ac.id/article/15086/47/article.pdf
- [10] Warman, Yoel. 2008. Kajian Evaluasi Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Mengenai Kewajiban Sertifikasi Bagi Tenaga Ahli Konstruksi. Tesis, Institut Teknologi Bandung. <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/608/jbptitbpp-gdl-yoelwarman-30377-1-2008ts-r.pdf>
- [11] Wulfram I Ervianto. Pengukuran Produktivitas Kelompok Pekerja Bangunan dalam Proyek konstruksi (studi kasus proyek gedung bertingkat di Surakarta). Jurnal Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta. Volume 9 no. 1, oktober 2008 : 31 – 42